

COO Miss Universe Disebut Rendahkan Martabat Finalis saat Body Checking

JAKARTA (IM) - Polisi telah menetapkan chief operating officer (COO) Miss Universe berinisial ASD alias S sebagai tersangka pecehan terhadap peserta Miss Universe saat body checking dan difoto tanpa busana terhadap para finalis.

Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi menyebutkan, tersangka juga melakukan penghinaan dan merendahkan martabat dari para finalis saat body checking.

"Artinya kemudian meminta pada hal-hal yang sifatnya seperti penghinaan secara merendahkan martabat dari pada korban," kata Hengki kepada wartawan Minggu (8/10).

Tersangka ASD alias S juga meminta para korban untuk membuka pakaiannya dan kemudian mengambil foto tanpa busana.

"Dia secara langsung melakukan tindakan berupa memerintahkan membuka baju, kemudian pada hal-hal yang tidak diterima oleh korban. Dia juga memfoto," jelasnya.

Sebagaimana diketa-

hui, kasus dugaan pelecehan seksual bermotif body checking pada finalis Miss Universe Indonesia (MUID) naik ke penyidikan setelah sebelumnya Polda Metro Jaya resmi menerima laporan polisi yang dibuat finalis Miss Universe Indonesia 2023, terkait dugaan pelecehan seksual dalam ajang tersebut. Laporan diterima dengan nomor LP/B/4598/VII/2023 SPKT POLDA METRO JAYA.

Korban 30 orang

Peserta Miss Universe 2023 yang diduga menjadi korban pelecehan seksual mencapai 30 orang. Meski demikian tidak semua korban melapor langsung ke Polda Metro Jaya dan hanya memberi surat kuasa.

"Sebenarnya yang mengalami dugaan pelecehan ini ada sebanyak 30 orang. Tapi yang memberikan kuasa baru 7 orang. Seiring berjalannya waktu terus bertambah," ungkap kuasa hukum korban, Mellisa Anggraini pada wartawan di Polda Metro Jaya Rabu (9/8). • lus



TACTICAL FLOOR GAME PENGAMANAN KTT AIS
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono (kiri) dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (kanan) meninjau tactical floor game (TFG) pengamanan VIP KTT AIS Forum 2023 di kompleks Kodam IX Udayana, Denpasar, Bali, Minggu (8/10). TFG tersebut digelar untuk menyusun taktik dan strategi yang akan diterapkan dalam pengamanan KTT AIS pada 11 Oktober 2023.

Kapolrestabes Semarang Diperiksa Soal Kasus Dugaan Pimpinan KPK Peras SYL

Kombes Irwan Anwar diklarifikasi oleh Polda Metro Jaya terkait dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK kepada mantan Mentan SYL.

JAKARTA (IM) - Polda Metro Jaya memeriksa Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar, terkait dugaan pemerasan Eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, oleh pimpinan KPK.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengatakan, pemeriksaan terhadap Irwan dilakukan pada saat tahap penyelidikan. Kini, kasus dugaan pemerasan atas Eks Mentan Syahrul sudah dinaikkan ke tahap penyidikan.

"Benar, (Irwan) salah satu saksi yang sudah dilakukan klarifikasi di tahap penyelidikan," kata Ade Safri saat dihubungi wartawan, Minggu (8/10).

Ade Safri mengatakan, Irwan akan dipanggil kembali oleh Polda Metro untuk diminta keterangan lanjutan saat proses penyidikan.

"Setelah tahap sidik ini,

akan diagendakan pemanggilan terhadap yang bersangkutan untuk diminta keterangan sebagai saksi," katanya.

Diketahui, status perkara ini naik ke tahap penyidikan usai dilakukan gelar perkara pada 6 Oktober 2023.

"Dari hasil pelaksanaan gelar perkara dimaksud, selanjutnya direkomendasikan untuk dinaikkan status penyelidikan ke tahap penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan," ungkap Ade dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Sabtu (7/10).

"Dalam rangka penyelidikan, telah dilakukan pemeriksaan oleh tim penyelidikan Tipikor Krimsus Polda Metro Jaya terhadap enam orang saksi," papar Ade.

Saksi yang diperiksa oleh polisi yakni Syahrul Yasin Limpo sendiri, ajudan, dan sopirnya.

Sejauh ini, Ade Safri ma-

sih belum bersedia memberikan nilai uang dalam kasus pemerasan tersebut.

"Jadi untuk materi penyidikan nantinya, mohon maaf (nilai pemerasan) kami belum bisa share kepada rekan-rekan media sekalian," ujar Ade.

Ia memastikan proses penyidikan ini dilakukan secara profesional oleh anggotanya.

Bukti Foto

Ade mengungkapkan, pihaknya akan menyelidiki soal foto pertemuan antara Ketua KPK Firlil Bahuri dengan Syahrul, di lapangan bulu tangkis. Pertemuan antara dua tokoh itu diduga terjadi pada bulan Desember 2022 lalu.

"Terkait dengan foto yang beredar, seputar pertemuan yang terjadi juga telah direkomendasikan dalam pelaksanaan gelar perkara pada hari Jumat 6 Oktober 2023 di ruang gelar perkara," ujar Ade.

Ade menjelaskan, pendalaman foto yang beredar mengacu pada Pasal 65 juncto Pasal 36 Undang-Undang RI tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Terkait adanya larangan untuk berhubungan langsung

maupun tidak langsung dengan pihak tersangka," kata Ade.

Dia memastikan bahwa foto tersebut juga masuk dalam materi penyidikan kasus dugaan tindak pidana pemerasan.

Ade menyampaikan, kasus dugaan tindak pidana korupsi ini merujuk pada Pasal 12

huruf e atau Pasal 12 huruf B, atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). • lus



TRABAS BHAYANGKARA DI TEMANGGUNG
Peserta memacu motor trail di lintasan tanah saat Trabas Bhayangkara Polres Temanggung di Bejen Fruit Garden Desa Bejen, Temanggung, Jateng, Minggu (8/10). Acara yang diikuti 600 peserta dari berbagai daerah tersebut itu guna menggalang dana guna pembangunan infrastruktur di pedesaan sekaligus untuk mempromosikan wisata petualangan di kalangan penggemar otomotif.

Komnas HAM Minta Kapolda Kalteng Hukum Polisi yang Lakukan Kekerasan di Seruyan

JAKARTA (IM) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Kapolda Kalimantan Tengah Irijen Pol Nanang Avianto, turun tangan menyelesaikan konflik antara warga dan polisi di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah.

Bentrok antara warga dan sejumlah anggota polisi terjadi di sekitar PT Hampan Masawit Bangun Persada, Desa Bangkal, Kecamatan Seruyan. Komnas HAM menyalahkan adanya tindakan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan luka berat pada konflik agraria yang terjadi pada Sabtu (7/10).

"Meminta Kapolda Kalimantan Tengah untuk melakukan penegakan hukum terhadap anggota kepolisian atau pihak-pihak lain yang melakukan kekerasan mengakibatkan jatuhnya korban meninggal dunia dan luka berat," kata Koordinator Subkomisi Penegakan HAM, Uli Parulian Sihombing dalam keterangannya, Minggu (8/10/).

Uli mengatakan, pihaknya prihatin dan berduka-cita yang mendalam atas peristiwa tersebut. Komnas HAM akan melakukan penyelidikan atas insiden kekerasan tersebut. Menurut Uli, Komnas HAM juga sudah proaktif memantau konflik agraria di wilayah tersebut sejak September 2023.

"Meminta Polda Kalimantan Tengah, Pemerintah Kabupaten Seruyan serta seluruh masyarakat untuk menjaga situasi tetap kondusif," pinta Uli.

Berkaca kasus ini, Komnas HAM juga mendorong

semua pihak tidak melakukan kekerasan serta mengutamakan dialog dalam mencari solusi atas segala persoalan.

"Agar semua pihak mengedepankan prinsip-prinsip kemanusiaan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia," katanya.

Sebelumnya diberitakan, seorang warga tewas diduga tertembak dan satu lainnya mengalami luka berat dalam bentrok antara warga Bangkal dan polisi di perusahaan perkebunan sawit, PT. Hampan Masawit Bangun Persada 1 di Desa Bangkal, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, Sabtu (7/10).

Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Erlan Munaji, membenarkan telah terjadi bentrok antara warga dan polisi di lokasi perkebunan sawit tersebut. Bentrok pecah pada Sabtu (7/10) siang sekitar pukul 12.30 WIB.

Saat itu, kata Erlan, polisi sedang melakukan pengamanan konflik di lahan perkebunan milik PT. Hampan Masawit Bangun Persada 1. Menurut versi polisi, sejumlah warga mengadang aparat sambil membawa ketapel dan tombak.

"Sehingga terpaksa diamankan, namun warga tidak terima sehingga warga melakukan perlawanan dan menyerang petugas," katanya kepada wartawan, Sabtu (7/10).

Bentrokan pun tidak terhindarkan. Akibatnya satu orang warga tewas diduga tertembak, sementara 1 orang lainnya mengalami luka berat. Mereka kini telah dilarikan ke rumah sakit terdekat. • lus

Korban Kemalingan Kecewa Lantaran Cari Sendiri Petunjuk soal Jejak Pelaku

JAKARTA (IM) - Kapolsek Pasar Rebo Kompol Haris Akhmat Basuki menanggapi soal kekecewaan warga di Cijantung, Jakarta Timur yang atas kinerja polisi usai rumahnya kemalingan.

Haris memastikan, pihaknya telah menindaklanjuti perkara usai dilaporinya kasus pencurian rumah keluarga pasangan suami istri (pasutri) Feby (36) dan suaminya, Bara (33), di Jalan Kamboja Dalam, Cijantung, Pasar Rebo, pada Sabtu (30/9).

"Kejadian pada 30 September tersebut langsung ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian, dalam hal ini Polsek Pasar Rebo. Dilakukan olah TKP awal sebagai bentuk TPTKP (Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara)," kata Haris kepada wartawan, Sabtu (7/10).

Bahkan keesokan harinya, Haris juga memastikan bahwa pihaknya kembali menjalani olah TKP dengan mengikutsertakan tim unit identifikasi dari Polres Metro Jakarta Timur.

"(Ini) guna pengambilan sampel sidik jari dan pengumpulan barang bukti lainnya, guna mendukung dan pengembangan perkara agar dapat segera terungkap," ujar Haris.

Feby (36) dan suaminya, Bara (33), mengaku kecewa terhadap kinerja polisi karena mereka harus mencari sendiri petunjuk soal maling yang menjarah isi rumahnya.

Padahal, Feby dan Bara beserta keluarga lainnya, tidak menyentuh apa pun di tempat kejadian perkara (TKP) meski hanya memin-

dahkan barang. Tujuannya agar memudahkan pihak kepolisian melakukan identifikasi atau mengambil sidik jari pelaku.

"Saat itu kami langsung lapor ke Polsek Pasar Rebo dan enggak lama ada 4 polisi datang (ke TKP). Tapi kami agak kurang merasa pas dengan respons dari polisi itu," ungkap Feby di rumahnya, kawasan Cilandak, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Sabtu (7/10).

"Karena, ketika datang, sidik jari enggak diambil, barang bukti tidak diamankan, tidak mencoba melihat CCTV juga," ujar Feby.

Lantas, Feby dan keluarganya berinisiatif sendiri untuk mencari jejak pelaku dengan mencari CCTV secara mandiri di sekitar TKP. Secara kebetulan, seorang kurir paket sempat mengirimkan barang yang dipesan keluarga Feby dan Bara ke rumahnya. Berdasarkan data yang mereka lihat dari aplikasi tersebut, paket terkirim pada Sabtu (30/9) pukul 12.10 WIB.

Mereka menghubungi kurir tersebut untuk menanyakan bagaimana keadaan rumah saat datang ke TKP.

"Dan ternyata, menurut kurirnya, saat mengantar paket pintu pagar keadaan terbuka dan ada mobil hitam terparkir di garasi. Seharusnya, garasi rumah itu kosong, karena semua pada pergi," ujar Feby.

Tidak ingin berasumsi dari keterangan kurir paket, Feby dan Bara memvalidasi kesaksian tersebut ke tukang es buah yang memang berjualan tak jauh dari rumah mereka.

"Ya ada tukang es buah di dekat posko. Nah, kita

tanya, katanya memang lihat mobil hitam. Cuma, si tukang pakatnya ini sama si tukang es buah ini lupa mobilnya apa," kata Feby.

Sejauh ini, dari pihak keluarga, baru dua orang yang diambil keterangannya oleh pihak kepolisian, yakni ayah Feby sebagai pelapor dan Bara. Saat Bara diperiksa sebagai saksi korban, ia bertanya bagaimana perkembangan kasus tersebut. Dia juga sempat menyodorkan screen record dari CCTV ankringing dekat rumahnya.

"Bahkan, ketika suami saya datang pas hari Jumat lalu, kami yang insiatif, ini lho CCTV-nya. Sedangkan kita kan juga enggak bisa, karena itukan punya ankringing ya, enggak bisa main ambil saja," ujar Feby.

"Orang ankringannya bilang, 'ya sudah, tunggu bukti saja'. Cuma kan, kita kan berlomba sama waktu kalau kayak begini. CCTV enggak bisa selamanya," kata Feby.

Feby berharap pihak kepolisian lebih cepat bertindak dalam menangani perkara pencurian yang terjadi di rumah mereka.

"Karena kan barang bukti enggak bisa terlalu lama, kayak sidik jari atau apa. Pas datang itu seharusnya sidik jari diambil. Karena kan, yang kami pahami sebagai masyarakat, kalau ada kejadian dan enggak cepat ditanggapi, ya sudah, lenyap aja gitu, kayak uap aja," kata Feby.

"Karena, yang kami lihat sih seperti, dari barang bukti tidak diamankan, mencoba menelusuri juga enggak, komunikatif juga enggak. Jadi, itu sih harapan kami," tutur Feby lagi. • lus



KEBAKARAN LAHAN KOSONG DI JAKARTA UTARA

Kebakaran di lahan kosong Kampung Pulo Ngandang Jl. Inspeksi Kali Sunter Ex RT.09/013, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Minggu (8/10) berhasil ditangani dan dipadamkan oleh Dinas Pemadam Kebakaran.

11 Aktivist Greenpeace yang Demonstrasi di Kolam Bundaran HI Dipulangkan Polisi

JAKARTA (IM) - Polsek Menteng, Jakarta Pusat, memulangkan 11 aktivis dari Greenpeace Indonesia, setelah selesai diperiksa terkait aksi mereka menaruh gurita raksasa di kolam Bundaran HI, Jakarta Pusat pada Jumat (6/10) lalu.

"Sejak kemarin (dipulangkan)," kata Kapolsek Menteng Kompol Irwandy saat dikonfirmasi, Minggu (8/10).

Para aktivis lingkungan hidup ini dipulangkan usai diminta keterangannya oleh polisi. Namun Irwandy belum menjelaskan motif para aktivis Greenpeace menaruh gurita raksasa di kolam Bundaran HI.

"Setelah selesai diminta keterangannya diperbolehkan pulang kembali," ujar Irwandy.

Sebelumnya, pihak Greenpeace Indonesia meminta aparat kepolisian untuk segera membebaskan para aktivis atau relawan yang melakukan aksi damai di sekitar Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat pada Jumat (6/10) pagi.

Juru Kampanye Hutannya Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik mengatakan, belasan relawan yang terjun dalam aksi tersebut dilindungi oleh Undang-Undang (UU).

"Aksi mereka dilindungi Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelo-

laan Lingkungan Hidup (PLH), khususnya pasal 66. Di sana tertulis, 'Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata', ujarnya, dalam keterangan tertulis.

Diberitakan sebelumnya, belasan relawan Greenpeace membawa alat peraga berupa "gurita raksasa" yang ditaruh di kolam Bundaran HI pada 6 Oktober 2023. Gurita raksasa itu digambarkan tengah mencengkram tiga manekin yang menyerupai tiga figur politikus yang hendak maju di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 nanti.

Iqbal Damanik mengatakan, aksi itu merupakan seruan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mewaspada oligarki yang menyelip di belakang para kandidat. Namun, aksi damai yang dilakukan sekitar pukul 05.00 WIB itu tak berlangsung lama. Sebab, para relawan Greenpeace dibubarkan oleh beberapa petugas keamanan.

"Kami diminta untuk mengakhiri aksi yang dilakukan sekitar pukul 06.15 WIB. Relawan Greenpeace kemudian dibawa ke Polsek Menteng," kata Senior Forest Campaigner Greenpeace Southeast Asia Asep Komarudin saat dikonfirmasi. • lus